

BAB VI

PENUTUP

VI.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana telah diuraikan dalam bab sebelumnya, maka setidaknya dapat disimpulkan beberapa hal terkait pembangunan kawasan perdesaan di Kabupaten Lombok Barat, Lombok Tengah dan Lombok Timur yang merupakan tiga dari 10 (sepuluh) daerah atau kabupaten/kota di bawah wilayah administratif Provinsi Nusa Tenggara Barat, di antaranya sebagai berikut:

Pertama, Integrasi Komunikatif secara kelembagaan dalam pembangunan kawasan perdesaan menjadi salah satu proses penting sebagai penunjang keberhasilan termasuk dalam tahap perencanaan. Intensifnya komunikasi antara pemerintah dan tim fasilitasi dari UIN Mataram dalam penetapan TKPKP dan penyusunan dokumen perencanaan (SPKP) di Kabupaten Lombok Barat menjadikan koordinasi antar lembaga cukup efektif, yang ditunjukkan oleh adanya dokumen perencanaan yang sangat sistematis.

Koordinasi dalam perencanaan pembangunan kawasan ekowisata perdesaan di Kabupaten Lombok Tengah sementara itu dilaksanakan dalam dua tahap, antara Bappeda dengan tim fasilitasi dan DPMD dengan konsultan pembangunan. Koordinasi antara Bappeda dan tim fasilitasi dianggap kurang efektif karena RPKP hasil pembahasan kedua lembaga yang merupakan

dokumen perencanaan atau acuan pembangunan hingga saat ini masih dilakukan revisi dan belum mendapat pengesahan, artinya komunikasi antar Pemerintah (Bappeda) dan tim fasilitasi sebagai tim penyusun dalam hal ini tidak berjalan dengan baik, sedangkan koordinasi yang lebih efektif antara DPMD dengan pihak ketiga (konsultan) telah menghasilkan Masterplan pembangunan yang merupakan dokumen perencanaan pengganti RPKP pembangunan kawasan ekowisata yang pada tahun ini sedang dalam pelaksanaan, dengan demikian komunikasi DPMD dengan pihak ketiga mampu dibangun dengan baik.

Komunikasi yang kurang baik antar pemerintah dengan tim fasilitasi juga terjadi dalam pembangunan kawasan perdesaan Terjang di Kabupaten Lombok Timur. Perencanaan pembangunan kawasan perdesaan di kabupaten tersebut berjalan dengan lambat, bahkan hingga tahun 2018 RPKP pembangunan kawasan Terjang belum juga disahkan atau menjadi Perbup, oleh karena koordinasi antara pemda dan tim fasilitasi tidak berjalan dengan harmonis.

Kedua, integrasi fungsi kelembagaan dalam kegiatan proses penetapan kawasan dan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan kawasan perdesaan sejauh ini menunjukkan masih sangat kurang di ketiga Kabupaten, dimana lembaga baik Pemerintah, Perguruan Tinggi, dan juga LSM di tingkat daerah belum mampu mengintegrasikan fungsinya masing-masing untuk

mencapai tujuan pembangunan kawasan perdesaan di Provinsi NTB, bahkan fasilitasi yang diberikan Kemendes kepada daerah dengan menunjuk sebuah perguruan tinggi untuk membantu dalam perumusan atau perencanaan program hanya mampu di manfaatkan dengan baik oleh Pemda Kabupaten Lombok Barat, sementara integrasi fungsi lembaga pemerintah dengan pihak ketiga dalam pembangunan kawasan di Kabupaten Lombok Tengah dan Lombok Timur masih terbentur oleh komunikasi dan koordinasi yang berjalan dengan kurang baik.

VI.2 Saran

Saran dan masukan yang dapat ditawarkan berdasarkan hasil penelitian terhadap pembangunan kawasan perdesaan di Provinsi Nusa Tenggara Barat pada umumnya dan khususnya Kabupaten Lombok Barat, Lombok Tengah, dan Lombok Timur ialah sebagai berikut;

Pertama, pemerintah daerah diharapkan lebih agresif untuk membangun komunikasi dengan lembaga-lembaga lain baik perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, pihak swasta, dan berbagai stakeholder lainnya agar proses pembangunan kawasan perdesaan menjadi lebih terintegrasi baik secara vertikal maupun horizontal sehingga terwujudnya keterpaduan program antar lembaga, dengan demikian tujuan pembangunan dapat dicapai dengan lebih optimal.

Kedua, proses perencanaan pembangunan kawasan perdesaan harus dilakukan dengan lebih baik lagi, perencanaan yang lebih baik dalam artian pemerintah sebagai aktor utama perencana program harus memiliki kesadaran akan keterbatasan sumber daya yang dimiliki dan berkemauan untuk mengajak berbagai pihak atau lembaga terlibat langsung dalam proses perencanaan. keterlibatan pihak-pihak dari luar pemerintah seperti perguruan tinggi dan lembaga swadaya masyarakat tentu akan semakin melengkapi fungsi pemerintah sebagai perencana pembangunan daerah, sehingga program yang direncanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Ketiga, selain kerjasama/koordinasi pemerintah juga perlum memiliki strategi pembangunan kawasan perdesaan memiliki muatan yang lebih komprehensif dan tidak hanya dipersiapkan untuk menutupi atau mengatasi kelemahan dan kekurangan-kekurangan saja tapi juga harus mampu mengonter segala bentuk tantangan dan ancaman baik secara internal maupun eksternal dengan langkah-langkah antisipasi agar pembangunan dapat berjalan lancar dan tidak terkendala oleh hal-hal yang di luar kontrol pemerintah.